

KEKERASAN SIMBOLIK DAN PENGALAMAN PEREMPUAN BERPOLITIK DI ACEH

Musdawati

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

musd4wati@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji teori Pierre Bourdieu, sosiolog Perancis, dalam membongkar mekanisme terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan dalam ranah politik praktis. Gagasan Bourdieu tentang teori habitus, modal, arena, kekerasan serta kekuasaan simbolik akan digunakan sebagai perspektif dalam membongkar mekanisme ketimpangan gender dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan khususnya perempuan yang terlibat dalam politik. Terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, menurut teori Bourdieu, tidak bisa dilepaskan dari adanya kekerasan simbolik yang menjadi dasar bagi terbentuknya jenis-jenis kekerasan lain, seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan simbolik adalah bentuk kekerasan yang tak mudah dikenali. Kekerasan ini beroperasi melalui simbol-simbol wacana yang menghegemoni objek yang didominasi mengikuti pemakna yang diproduksi berdasarkan kepentingan subjek yang mendominasi. Akar kekerasan ini beroperasi melalui habitus perempuan yang memosisikannya sebagai subordinat di masyarakat, serta kemiskinan yang dialami baik secara ekonomi, budaya, sosial dan modal simbolik. Kekerasan yang bekerja pada level pengetahuan ini, tidak akan membuat perempuan memahami dan mengerti bahwa mereka sedang menjadi objek dan tidak akan melakukan perlawanan.

I. Pendahuluan

Wacana partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia khususnya Aceh, bukanlah hal yang baru. Sejarah Indonesia telah mencatat sejumlah perempuan yang memiliki kapasitas dalam mengelola pemerintahan, panglima perang, bahkan ilmuwan, mereka tidak hanya memperoleh legitimasi dari kekuasaan, juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Berbeda dengan negara Islam lain, dimana peran perempuan hanya dibatasi pada wilayah domestik, di Indonesia perempuan-perempuan telah diakui kontribusi dan peran mereka dalam berbagai aktifitas dalam ranah publik. Seperti yang dicatat oleh Syekh Yusuf Qardhawi, negara-negara timur tengah masih memperdebatkan keabsahan perempuan yang terjun menjadi anggota parlemen. Bahkan di Kuwait, sampai saat ini mayoritas ulama masih mengharamkan perempuan ikut terlibat dalam pemilihan anggota parlemen.

Di Aceh sendiri, abad ke 17 merupakan sebuah fase dimana terdapat empat ratu yang menjalankan pemerintahan, keempat ratu tersebut adalah Taj al-Alam Safiyyat ad-Din (1641 – 1775), Shah Zakiatuddin (1678 – 1680) dan Kemalat Shah (1688 – 1699). Meskipun terdapat beberapa kontroversi mengenai kenaikan empat ratu pada posisi sultanah, namun pada saat mereka berkuasa, mereka mampu membawa Aceh dalam kondisi yang damai dan makmur.¹ Bahkan salah satu keberhasilan ratu tersebut adalah menyelesaikan konflik antara kelompok ulee balang dan orang kaya.²

Dalam beberapa catatan James Siegel dalam *Rope of God* (1960) menyebutkan bahwa perempuan Aceh telah memiliki posisi tertentu dalam keluarga dan masyarakat. Para perempuanlah yang mengatur perekonomian keluarga mendidik anak-anak mereka, pada saat laki-laki dan para suami merantau.

Tak dapat dipungkiri, bahwa dalam struktur budaya masyarakat Aceh perempuan memiliki posisi yang penting khususnya dalam pengambilan keputusan³.

Salah satu isu yang saat ini menjadi isu global dan menjadi indikator pencapaian pembangunan adalah partisipasi perempuan dalam politik.

Era kontemporer ditandai dengan semakin tingginya kesempatan perempuan untuk dapat mencapai pendidikan, memberikan peluang pada perempuan untuk berpartisipasi pada dunia publik yang jauh lebih luas, khususnya dalam politik.

Namun, harus diakui bahwa partisipasi politik perempuan sejak orde baru sampai dengan era reformasi masih minim. Jika melihat angka keterwakilan perempuan ditingkat nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu 2009 – 2014 jumlahnya mencapai 100 orang, atau 17,86 % dari 500 total anggota DPR. Pemilu 2009 merupakan pemilu dimana jumlah terbesar kursi DPR yang pernah diduduki oleh perempuan. Meskipun jumlah ini masih jauh dari angka

¹ Hadi, Amirul. Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

² Ozay, Mehmed, *Women as Rulers Phenomenon in Shout East Asian Islamic Society, The Queens of Aceh*, in *World Journal of Islamic History and Civilization*1 (3), IDOSI Publication, 2011, hal. 2

³ Lihat T. Siegel, James, *Rope of God*, California University Press, 1965. Lihat juga Hadi, Amirul. Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

30%. Pada pemilu 2004 menghasilkan 61 orang atau 11,9 % sementara pada pemilu 1999 hanya menghasilkan 45 orang atau naik 9 %.⁴

Dalam konteks politik lokal, pemilu 2004 – 2014 partisipasi politik perempuan juga tidak menunjukkan angka yang memuaskan. Jumlah perempuan yang dapat duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan rakyat hanya berjumlah 4 orang saja yang terdiri dari Yuniar (Golkar), Liswani (PAN), Nurlelawati (Golkar), Nuraini Maida (Golkar), jika dipresebtasikan hanya 5,8%.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik tersebut disebabkan oleh banyak faktor, masih kuatnya budaya patriarkhi dimana laki-laki masih ditempatkan pada posisi superior dan juga cenderung membatasi gerak perempuan, juga rendahnya kapasitas perempuan, kurangnya pengalaman berpolitik dikalangan perempuan juga keterbatasan sumber finansial⁵.

Meskipun demikian, banyak faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan, tidak hanya berasal dari internal perempuan juga external perempuan seperti masyarakat masih belum dapat mempercayai kemampuan perempuan, pemahaman agama yang memandang bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin juga komitmen partai untuk meningkatkan kualitas kader partai perempuan yang rendah.

Jika diandaikan bahwa faktor-faktor diatas merupakan faktor penghambat masuknya perempuan dalam ranah politik, namun pada saat perempuan dapat masuk dalam politik praktis mereka juga masih harus menghadapi berbagai persoalan, diskriminasi, marginalisasi bahkan stereotype bahwa politik bukanlah wilayah perempuan dan posisi perempuan sebagai objek dan pelengkap untuk memenuhi kuota 30% demi lulusnya verifikasi partai.

Meskipun diawal diyakini bahwa mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam politik merupakan sesuatu yang akan mendorong terhadap upaya pemberdayaan perempuan, namun tanpa disadari bahwa perempuan malah menjadi korban. Posisi perempuan dalam partai lebih sebagai pelengkap dari pada *agency* yang memiliki kapasitas menentukan. Anehnya bagi banyak perempuan yang ikut dalam pencalegan situasi ini dipandang wajar sebagai sebuah konsekwensi pilihan politik⁶.

Nilai-nilai maskulinitas dianggap sebagai nilai dominan yang harus diadopsi dan digunakan oleh perempuan dalam berpolitik. Situasi ini sebenarnya bukanlah sebuah relasi yang

⁵ Lihat Musdawati dalam laporan Penelitian DIPA UIN Ar-Raniry, *Peran Perempuan Dalam Politik di Aceh*, 2015 (Tidak dipublikasi)

⁶ Khofifah Indar Parawangsa, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi*, LP3ES, 2006, Hal. 21

terjadi secara netral, namun terjadi dalam sebuah relasi kuasa yang timpang. Dalam gagasannya Pierre Bourdieu ini merupakan bentuk kekerasan simbolis, sebuah Kekerasan yang dianggap sebagai hal wajar inilah yang menarik perhatian Pierre Bourdieu, seorang Filosof sekaligus sosiolog asal Perancis. Ia menggagas satu teori, yaitu teori kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yang akan membongkar bagaimana mekanisme kekerasan terhadap perempuan. Teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu, serta serangkaian teori - teori yang mendasarinya memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan sistemik yang sudah mengakar dan terjadi melalui proses panjang.

Teori Pierre Bourdieu tersebut dapat memetakan akar terjadinya kekerasan dengan terlebih dahulu memahami posisi sosial perempuan dalam masyarakat, serta mengenali jenis kekerasan lain yang justru mendapat persetujuan kaum perempuan sendiri. Teori ini sangat penting untuk memberi penjelasan tentang akar permasalahan terus berlanjutnya kekerasan dalam dunia publik khususnya bagi perempuan yang masuk dalam ranah politik.

Mengenal Sosok Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu lahir di Denguin Pyrenia Atlantik (Perancis) pada tahun 1930. Ayahnya seorang pegawai kantor pos. Karier pendidikannya dimulai dari lycee di Pau, kemudian sekolah menengah atas (lycee) Louisle-Grand (Paris), mengambil Fakultas sastra di Paris. Pada tahun 1951, ia melanjutkan pendidikannya ke Ecole Normale Superieure, salah satu institusi pendidikan elit di Paris. Bourdieu mengajar sebentar di lycee di Moulins sebelum akhirnya pada tahun 1956 mendapat wajib militer bersama tentara Perancis ke Aljazair. Selama dua tahun di Aljazair (1958-1960), ia menghabiskan waktunya mengajar di fakultas sastra di Alger sembari melakukan penelitian empiris mengenai masyarakat Aljazair. Sekembalinya dari Aljazair, Bourdieu berpindah-pindah mengajar. Setelah mengajar di Sorbonne selama dua tahun (1961-1962), ia mengajar di Universitas Lille (1961-1964). Setelah itu ia diangkat menjadi direktur studi di Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) dan menjadi direktur pula di Pusat Kajian Sosiologi Eropa (Centre de Sociologie Europeenne).⁷

Puncak karier akademis dicapainya ketika dinobatkan sebagai pakar sosiologi dan menggantikan Raymond Aron memimpin College de France (1981). Posisi intelektualnya

⁷ FauziFashri, Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol (Yogyakarta: Jalasutra dan Republik Institut, 2014), hlm. 48.

semakin kuat, ketika mendapatkan penghargaan medali emas dari Pusat Ilmiah Nasional pada tahun 1993. Pierre Bourdieu meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2002 karena sakit kanker⁸.

Bourdieu termasuk salah satu pemikir yang secara gemilang mampu meletakkan pengalaman hidupnya sebagai salah satu sumber yang memberikan inspirasi teoretik bagi karya-karyanya. Berasal dari daerah terpencil dan harus berhadapan dengan dunia intelektual kampus prestisius, membuat ia teragap. Ia merasa rendah diri berhadapan dengan rekan-rekannya dari kalangan borjuis yang cerdas dan lincah dalam bertutur kata. Orang-orang yang mengelilinginya di kampus prestisius itu telah terbiasa dengan bahasa cerdas baik dalam menulis maupun bertutur kata. Pengalaman mengikuti wajib militer di Aljazair juga menjadi salah satu pemicu kesadarannya akan posisi seorang intelektual berhadapan dengan masalah sosial. Ia ingin berempati, merasakan apa yang dirasakan masyarakat Aljazair akibat kolonialisme Eropa. Dari sini pula ia mulai mengubah minatnya dari Filsafat ke Sosiologi. Bourdieu melibatkan diri secara aktif dalam gerakan-gerakan sosial politik. Ia mendukung siswa SMU yang berdemonstrasi menentang seleksi masuk universitas. Pada saat terjadi pemogokan umum, ia mengajak para intelektual mendukung para pemogok. Ia juga mendukung intelektual Aljazair yang menjadi korban kekerasan kaum militan. Bourdieu juga mengkritik pemerintahan sosialis Perancis. Ia menggalang gerakan menentang para pakar, wartawan dan penulis istana yang dianggap menjadi kaki tangan neo-liberalisme.

Karya-karya Pierre Bourdieu

Selain keterlibatannya secara langsung sebagai aktivis yang menyuarakan dan membela kelompok-kelompok marginal, Bourdieu juga tercatat sebagai penulis yang produktif yang telah menghasilkan banyak karya, baik berupa buku-buku, esai, maupun artikel. Tulisannya mencakup berbagai bidang, mulai dari politik, pendidikan, budaya, seni, hingga sastra. Berikut ini karya-karya Pierre Bourdieu, baik yang ditulis sendiri maupun bersama orang lain: *Algeria* (1960), *Distinction* (1979), *Homo Academicus* (1984), *The Algerians* (1962), *Outline of Theory of Practice* (1977), *Reproduction in Education, Society and Culture* (ditulis bersama Jean-Claude Passeron) (1977), *The Inheritors: France Students and Their Relations to Culture* (ditulis bersama Jean-Claude Passeron) (1979), *The Logic of Practice* (1990), *In Other Words: Essay Towards a Reflexive Sociology* (1990), *The Love of Art: European Art Museums and Their*

⁸ Ibid. hal. 49

Public (bersama Alain Darbel) (1990), The Political Ontology of Martin Heidegger (1991), Language and Symbolic Power (1991), An Invitation to a Reflexive Sociology (bersama Loic J.D. Waququant) (1992), The Field of Cultural Production (1993), The State Nobility: Elite School in the Field of Power (1996), Practical Reason (1998), Acts of Resistance (1998), Masculine Domination (2001), The Social Structure of the Economy (2005).

Gagasan-Gagasan Bourdieu

1. *Habitus*

Salah satu konsep penting yang digagas Bourdieu adalah habitus. Melalui habitus Bourdieu menjelaskan secara mendasar prinsip-prinsip kehidupan sosial sehari-hari beserta keteraturan yang mengiringinya. Habitus dapat dirumuskan sebagai sistem disposisi - disposisi (skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan) yang diperoleh dan bertahan lama. Habitus juga merupakan gaya hidup (lifestyle), nilai-nilai (values), watak (disposition), dan harapan kelompok sosial tertentu. Bourdieu menyatakan bahwa: *habitus adalah struktur mental yang digunakan untuk memahami dunia sosial, struktur mental ini merupakan produk utama hasil internalisasi struktur dunia sosial*⁹.

Dengan habitus, Bourdieu ingin mendamaikan antara agensi dan struktur yang dalam perdebatan Sosiologi selama ini, selalu diperhadapkan secara diametral. Upaya mendamaikan relasi antara agensi dan struktur ini dinamakan Bourdieu dengan strukturalisme genetik, yaitu analisa struktur-struktur objektif yang tidak bisa dilepaskan dari analisis asal-usul struktur mental dalam individu biologis.

Lebih jelas Bourdieu mengatakan bahwa:

“Analisis atas struktur objektif –yakni berbagai arena yang berbeda-beda— tidak bisa dipisahkan dari analisis di tingkat individu-individu biologis tentang asal-usul (genesis) struktur mental yang sampai tingkat tertentu merupakan produk dari pembatiran struktur-struktur sosial; dan juga tidak bisa dipisahkan dari analisis tentang asal-usul struktur sosial itu sendiri, bahwa ruang sosial dan kelompok-kelompok yang berada di dalamnya adalah produk dari pergulatan historis (tempat di mana agen-agen berpartisipasi sesuai dengan posisi mereka dalam ruang sosial dan dengan struktur mental yang mereka pakai untuk memahami ruang tersebut)”¹⁰.

⁹ Pierre Bourdieu, In Other Word: Essays Toward a Reflexive Sociology (Cambridge: Polity Press, 1990), 130-131. 13Ibid., hlm. 14

¹⁰ Lihat juga dalam Pierre Bourdieu, Choses Dites: Uraian dan Pemikiran, terj. Ninik Rochani Sjams (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 21.

Bourdieu menyatakan bahwa habitus tidak dapat dipahami secara tunggal namun memiliki makna yang beragam.

Pertama, habitus merupakan pengkondisian yang dikaitkan dengan keberadaan suatu kelas. Keseragaman habitus dalam suatu kelompok menjadi dasar perbedaan gaya hidup dalam suatu masyarakat. Karena habitus terbentuk melalui interaksi individu dengan struktur obyektif dunia sosialnya, secara otomatis, struktur subyektif akan menyesuaikan dengan struktur obyektif dunia sosial tersebut.

Kedua, habitus merupakan bentuk pemahamn yang menjadi prilaku yang tidak selalu disadari, sehingga terlihat bahwa ini merupakan kemampuan alamiah. Habitus ini dikonstruksi melalui proses pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga pendidikan masyarakat dalam arti luas. Uniknya proses yang membentuk pengalaman ini terjadi secara halus, sehingga seseorang tak menyadarinya sehingga seolah-olah sebagai sesuatu yang alamiah¹¹. Proses ini seperti yang digambarkan oleh Bourdie sebagai proses dua arah yaitu eksternalisasi dan internalisasi¹².

Ketiga, habitus adalah kerangka penafsiran untuk memahami dan menilai realitas, sekaligus penghasil praktik-praktik kehidupan yang sesuai dengan struktur-struktur objektif.

Keempat, habitus merupakan struktur intern yang selalu dalam proses restrukturasi. Meskipun habitus merupakan struktur internal yang memberikan pilihan tindakan, tetapi habitus tidak menjadi determinan tindakan. Habitus sekedar menyarankan apa yang seharusnya dipikirkan orang dan apa yang seharusnya dipilih untuk dilakukan¹³.

Habitus merupakan struktur kognitif yang memediasi individu (internal) dan realitas sosial (ekternal); menjadi perantara antara individu dan kolektivitas. Proses ini terjadi melalui sekumpulan skema yang telah terinternalisasi, sehingga manusia dapat memersepsi, memahami, menghargai, dan mengevaluasi realitas sosial.¹⁴

Kelima makna habitus di atas dapat dilihat misalnya dari peran tertentu yang selalu dilekatkan pada perempuan. Perempuan selalu diidentikkan dengan mengasuh anak. Kemampuan ini dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. Habitus mengasuh anak yang dimiliki

¹¹ Lihat Bagus Takwin, "Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup", dalam Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hlm. 35-54.

¹² Richard Jenkins, Pierre Bourdieu (London dan New York: Routledge, 1992), hlm. 79.

¹³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, terj..Nurhadi, Cet. 7 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 582.

¹⁴ Bagus Takwin, Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial, dalam Richard Harker (ed.), (Habitus x Modal)

perempuan sesungguhnya berasal dari pembatinaan struktur obyektif selama hidupnya, keluarga dan masyarakat mengajarkan perempuan untuk menjadi orang yang seharusnya lebih bisa mengasuh anak dibanding laki-laki. Ini yang disebut *structured structure*, struktur mengasuh anak dalam diri perempuan merupakan produk dari dunia sosial. Hasil pembatinaan struktur obyektif itu kemudian menjadi skema dan kerangka berfikir perempuan dalam menafsirkan realitas.

2. Modal (capital)

Disamping *habitus*, Bourdieu juga membicarakan tentang modal. Posisi seseorang dalam ranah (*field*) atau arena sosial sangat tergantung jumlah modal yang dimilikinya. Modal tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat hal, yaitu: modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik.

Pertama, modal ekonomi (*economic capital*) merupakan modal dalam bentuk kekayaan yang dimiliki aktor. Jumlah kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan, akan menentukan posisi dan kedudukannya dalam arena kehidupan sosial. Bourdieu menambahkan bahwa modal ekonomi adalah modal dapat ditransformasikan menjadi modal-modal yang lain. Sebagai contoh dengan uang yang banyak seseorang akan mudah memiliki sesuatu yang dibutuhkan untuk mendapatkan modal simbolik, seperti membeli rumah dan mobil mewah, perhiasan mahal, dan lain-lain. Juga untuk dapat mengakses biaya pendidikan pada institusi pendidikan ternama.

Kedua, modal budaya (*cultural capital*) yang berupa serangkaian kemampuan atau keahlian individu, termasuk di dalamnya pengetahuan, keterampilan, cara bergaul, dan lain-lain yang berperan di dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal budaya dapat terwujud dalam disposisi tubuh dan pikiran yang dihargai dalam suatu wilayah tertentu; dapat terwujud dalam benda-benda budaya seperti buku, hasil karya, atau benda-benda lain yang dapat diwariskan; dapat berupa kondisi yang terlembagakan, seperti keikutsertaan dan pengakuan dari lembaga pendidikan.¹⁵

Ketiga, modal sosial (*social capital*) yang berupa jaringan sosial yang dimiliki yang juga berperan dalam menentukan kedudukan sosial. Semakin banyak kenalan seseorang dan semakin banyak memiliki kesamaan cara pandang, maka semakin kaya modal sosial yang dimilikinya. Bagi Bourdieu, modal sosial adalah aset dari orang-orang yang berkedudukan istimewa dan merupakan sarana untuk mempertahankan superioritas mereka.¹⁶

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

Keempat, modal simbolik (symbolic capital), modal ini tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi akibat khusus suatu mobilisasi.¹⁷ Kelas yang dominan adalah kelas yang memiliki volume terbesar dari keempat modal tersebut, sedangkan kelas bawah adalah yang memiliki modal paling sedikit.

3. Arena atau Ranah

Arena atau ranah merupakan area dimana setiap aktor berinteraksi, kapasitas interaksi tersebut sangat ditentukan berdasarkan modal – modal yang dimilikinya. Pelaku yang mempunyai jenis-jenis modal tertentu akan menjadi dominan di area-area tertentu. Sehingga aktor dapat melakukan dominasi dalam suatu arena atau medan sosial tertentu tergantung pada kepemilikannya akan jenis-jenis modal yang dibutuhkan untuk bermain dalam arena itu.

Untuk dapat masuk dan diterima dalam suatu arena, maka aktor harus memiliki pengetahuan mengenai aturan permainan yang berlaku diarena tersebut. Bila tidak, maka seseorang tidak akan diterima dalam sebuah arena.¹⁸

Selain habitus, arena atau ranah adalah konsep penting Bourdieu lainnya. Bagi Bourdieu, arena merupakan ranah pertempuran dan perjuangan sosial.¹⁹ Konsep ini memandang realitas sosial sebagai suatu topologi (ruang), dimana arena dimaknai sebagai sepotong kecil dunia sosial, sebuah jagad penuh mufakat yang bekerja secara otonom dengan hukum-hukumnya sendiri, misalnya arena politik, seni, ekonomi, agama, dan lain sebagainya.

4. Teori Kekerasan Simbolik

Memahami kekuasaan dan kekerasan simbolik meniscayakan pemahaman kita akan peran bahasa sebagai sistem simbol. Selain berperan sebagai alat komunikasi dalam memahami dan menyampaikan pikiran serta perasaan antar manusia, bahasa memiliki peran laten yang seringkali tidak disadari, yaitu sebagai praktik kekuasaan. Dengan menggunakan simbol-simbol bahasa, ideologi yang terdapat dibalikinya dapat disemaikan perlahan-lahan secara tidak kentara. Tidak hanya terdiri dari sekumpulan kata-kata yang bermakna bagi pemahaman, lebih jauh bahasa dapat dijadikan sebagai instrumen kekerasan untuk mendapatkan legitimasi dan memperebutkan kesempatan mendefinisikan realitas. Dominasi terhadap simbol merupakan

¹⁷ Haryatmoko, Menyingkap, hlm. 12

¹⁸ Ibid

¹⁹ Pierre Bourdieu dan L. J. D. Wacquant, The Purpose of Reflexive Sociology (The Chicago Workshop) dalam Pierre Bourdieu dan L.J.D. Wacquant (ed.), An Invitation to A Reflexive Sociology (Chicago: University of Chicago Press, 1992), hlm.101

kekuasaan yang dapat membuat orang mengenali dan mempercayai, memperkuat dan mengubah pandangan mengenai dunia²⁰.

Seseorang atau kelompok dengan kekuasaan simbolik dapat mengendalikan simbol dan mengonstruksi realitas melalui tata simbol tersebut. Mereka berada pada posisi tertinggi dalam strata sosial karena kepemilikan mereka akan modal ekonomi dan budaya serta kedua modal lainnya. Mereka adalah kelas menengah masyarakat, seperti karyawan, wiraswasta, dan pengusaha. Mereka adalah para buruh pabrik, buruh tani, dan pekerja dengan upah kecil individu, kelompok atau masyarakat patuh mengikuti mobilisasi simbolik tersebut. Ketika mereka menerima begitu saja, tidak menyadari pemaksaan yang ditanamkan lewat simbol tersebut, maka pada saat itu praktik kekuasaan simbolik bekerja. Kekuasaan simbolik adalah kekuasaan yang bekerja melalui simbol-simbol bahasa untuk menggiring mereka yang didominasi mengikuti makna yang diproduksi berdasarkan kepentingan yang mereka yang mendominasi. Dalam menyembunyikan dominasinya, kekuasaan simbolik menggunakan cara-cara yang sangat halus agar tidak dikenali. Karena begitu halusnya praktik dominasi yang dijalankan, korban tidak menyadari bahwa yang terjadi adalah praktik kekuasaan. Alih-alih menolak, korban bahkan menerima praktik dominasi tersebut. Pada saat seperti itu, korban mengalami apa yang diistilahkan Bourdieu dengan kekerasan simbolik²¹.

Memahami Akar Kekerasan Pada Habitus Perempuan

Selain kelas, kategori sosial lain yang membedakan masyarakat adalah gender. Gender merupakan sebuah konstruksi sosial yang mengatur peran, fungsi dan posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman perempuan sehari-hari dibangun berdasarkan konstruksi gender yang berlaku dalam masyarakat. Gender sebagai *social category* menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku dan mempresentasikan dirinya agar dapat diterima oleh suatu masyarakat.

Sejak dilahirkan sebagai perempuan, maka nilai-nilai dan norma-norma tentang perempuan yang baik atau perempuan buruk telah ada dalam masyarakat, melalui proses

²⁰ 1Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge: Polity Press, 1991), hlm.165.

²¹Ibid., hlm. 38-39. Lihat juga, Pierre Bourdieu, *language*, hlm.128.

interaksi sosial, nilai-nilai tersebut disosialisasikan. Secara umum perempuan dipersepsikan sebagai makhluk yang penurut, lemah lembut dan pasif. Seorang anak perempuan akan dilarang keluarganya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sifat-sifat keperempuanan yang telah dilekatkan kepadanya. Anak perempuan akan diajar cara-cara bertutur kata dan berperilaku halus dan lemah lembut. Kelak setelah berkeluarga, perempuan diharapkan menjadi ibu dan istri yang salehah, istri yang taat dan patuh pada suaminya.

Sosialisasi ini berlangsung sejak baru lahir dilevel keluarga juga berlangsung dolevel masyarakat bahkan dalam instutusi pendidikan dan dalam kehidupan masyarakat secara umum²².

Sosialisasi yang lebih massif dan seringkali tak terasa karena terlalu sering dilakukan adalah presentasi perempuan melalui media. Semua ruang sosialisasi di masyarakat tersebut membentuk habitus perempuan sebagai makhluk kelas dua, sebagai makhluk lembut, penurut, pasif, dan lain sebagainya. Dengan habitus tersebut perempuan akan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan skema-skema yang telah diberikan masyarakat dan terinternalisasikan dalam pikirannya.

Habitus ini semakin menguatkan definisi masyarakat tentang perempuan. Pendefinisian negatif terhadap perempuan yang berlangsung lama serta dilakukan secara massif di semua ruang sosial sehingga akhirnya melahirkan habitus perempuan yang memposisikan dirinya sebagai anggota masyarakat kelas dua.

Perempuan menerima posisinya sebagai makhluk kelas dua yang diminta untuk patuh pada laki-laki. Bahkan perempuan menganggap hal itu sebagai kodrat yang sudah harus diterimanya karena terlahir sebagai perempuan.

Bentuk penginternalisasin nilai-nilai tersebut diatas diterima perempuan sebagai sebuah kewajiban, malah mempertanyakannya tidak mungkin untuk dilakukan, keadaan inilah yang disebut dengan kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini terjadi melalui sosialisasi yang berlangsung lama dan melalui strategi wacana tertentu yang melahirkan kepatuhan pada diri perempuan.

²² BeateKrais, Gender and Symbolic Violence: Female Oppression in the Light of Pierre Bourdieus's Theory of Social Practice , dalam Craig Calhoun, Edward LiPuma and Moishe Postone., Bourdieu: Critical Perspective (Cambridge: Polity Press, 1993), hlm. 170.

Pada akhirnya, melalui proses sosialisasi yang berlangsung lama, perempuan memiliki habitus sesuai dengan peran gendernya di masyarakat. Identitas gender ini berakar sangat dalam pada diri perempuan, menjadi bagian yang paling penting dimiliki, meskipun masuk kedalam ranah lain diluar ranah domestik. Identitas ini terus terbawa saat ia memasuki ranah politik.

Politik Sebagai Arena Perempuan Memainkan habitus dan Modal yang Dimilikinya

Sebelum menjelaskan lebih detail bagaimana posisi perempuan dalam politik menggunakan teori Bourdieu. Maka sebelumnya akan dijelaskan beberapa hal terkait dengan isu perempuan dalam politik

Habitus yang dimiliki perempuan hasil sosialisasi dalam bentuk pengasuhan dan pendidikan baik dalam keluarga, masyarakat maupun institusi formal, akan terbawa terbawa ke dalam arena politik yang dimasukinya. Keharusan perempuan untuk patuh dan mengabdikan pada suaminya menjadi kewajiban utama yang harus dilaksanakan.

Dalam beberapa kasus bentuk kepatuhan ini adalah dengan kewajiban mendapat izin suami sebelum perempuan terlibat dalam politik. Dalam proses pencalegan, partai memberlakukan aturan bahwa seorang caleg khususnya perempuan harus melampirkan persetujuan dari suami sebelum terlibat dalam partai atau kegiatan politik lain. Namun aturan ini tidak berlaku sebaliknya, artinya bahwa caleg laki-laki tidak perlu menyerahkan surat persetujuan dari istri. Namun, tidak ada perempuan yang melakukan protes terhadap kebijakan diskriminatif ini, bagi perempuan mendapat izin suami merupakan tiket awal sebelum mereka terjun ke dunia politik.

Dengan habitus tersebut, salah satu perempuan cenderung untuk mengembangkan sikap taat dan patuh pada kehendak suami. Kepatuhan ini menjadi nilai yang menunjukkan bahwa seseorang adalah perempuan yang baik. Bila dilihat dari teori modal (capital), kebanyakan caleg perempuan yang terlibat dalam pencalegan Pemilu 2014 lalu yang akhirnya kalah atau tidak mendapat suara mayoritas mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk dapat bersaing dan diterima dalam ranah politik yang dimasukinya. Ide bahwa perempuan adalah ibu rumah tangga dan tidak bekerja merupakan salah satu faktor yang membuat perempuan tidak memiliki modal baik itu modal finansial, budaya maupun pendidikan sehingga saat melangkah dan memasuki dunia politik dapat diterima.

Modal ekonomi seringkali dikuasai oleh suami, karena suamilah yang bekerja di luar rumah, sementara istri mengurus rumah dan anak-anak yang dilahirkan. Beberapa perempuan baik yang menang maupun kalah memiliki jumlah modal yang beragam, namun mayoritas menyebutkan bahwa modal sangat menentukan untuk proses pemenangan. Bagi perempuan modal mereka terjun kepolitik diperoleh melalui support dari suami. Sehingga izin suami tidak hanya untuk masuk bisa mendaftar menjadi caleg tapi juga memuluskan proses berikutnya. Berdasarkan argumentasi ini dapat disimpulkan bahwa menang dan kalahnya caleg perempuan sangat ditentukan oleh tiga modal lainnya, yaitu modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik.

Modal budaya dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan akses perempuan terhadap pengembangan pengetahuan dan skillnya. Salah satu dampak dari kuota 30% adalah, partai diharuskan untuk memasukkan perempuan dalam pencalonan, sementara partai tidak memiliki mekanisme perekrutan dan pendidikan kader khususnya kader perempuan, membuat partai membuka kemungkinan bagi siapa saja untuk mendaftar. Efeknya adalah partai tidak memberikan kualifikasi tertentu sebagai syarat, akibatnya perempuan yang tidak memiliki pengalaman baik itu pengalaman berpolitik maupun berorganisasi mayoritas terjaring. Bagi mereka terlibat dipartai adalah suatu pilihan yang menyenangkan tanpa memikirkan modal yang harus dibawa, hal ini akan mempengaruhi cara mereka melakukan kampanye dan pemenangan suara.

Pada sisi lain, perempuan tidak memiliki modal budaya, bagi masyarakat politik merupakan wilayah laki-laki. Keberadaan perempuan dalam politik dipandang sebagai *orang yang lain*. Tanggung jawab utama perempuan adalah wilayah domestik, ketika memasuki wilayah publik khususnya politik maka tugas domestik adalah tugas utama yang harus diselesaikan. Akibatnya perempuan mengalami beban ganda, mayoritas perempuan yang diwawancara menyebutkan demikian.

Di masyarakat, terutama kalangan masyarakat tradisional, masih berkembang pemahaman bahwa dunia politik adalah wilayah yang maskulin, atau wilayahnya laki-laki. Nilai-nilai maskulinitas dapat terlihat dari aturan yang ditetapkan partai, cara berkomunikasi, cara berelasi menunjukkan bahwa nilai-nilai kelelaki-lakian dianggap sebagai nilai dominan yang harus diadaptasi. Agar perempuan bisa *survive* dalam dunia politik maka perempuan harus mengadopsi nilai-nilai maskulin tersebut. Beberapa kader menyebutkan bahwa rapat adalah

situasi yang paling menegangkan, karena setiap orang boleh berbicara besar, menghardik bahkan berkelahi demi mempertahankan argumentasi mereka. Keadaan ini membuat perempuan yang masuk kedalam institusi partai merasa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini, ironisnya kemampuan untuk menegosiasikan tidak ada sehingga lagi-lagi perempuan harus menerima situasi tersebut, jika tidak bisa bertahan maka keluar adalah pilihannya.

Kemiskinan perempuan dari segi modal budaya ini juga berpengaruh pada kemiskinannya pada modal sosial dan simbolik. Perempuan kesulitan atau tidak memiliki habitus untuk membangun relasi sosial dengan anggota partai laki-laki lain, karena mayoritas mereka tidak memiliki pengalaman berorganisasi, keadaan ini membuat mereka dipandang inferior dan melegitimasi stigma bahwa perempuan adalah *inferior* yang lebih parah lagi keadaan ini dimanfaatkan oleh partai hanya sekedar untuk menyelamatkan partai.

Kemiskinannya pada ketiga modal sebelumnya tersebut membuatnya tidak punya modal simbolik, tidak punya posisi tawar apapun dipartai, mayoritas perempuan hanya diberikan nomor sepatu, nomor urut dalam pencalonan legislatif sebagai nomor yang memiliki peluang peraihan suara yang kecil atau ditempatkan pada dapil yang bukan wilayahnya, berdampak bahwa masyarakat tidak mengenal mereka sehingga akan sulit untuk mendapat suara.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik yang ditandai dengan rendahnya perempuan yang bisa masuk dalam pencalegan legislatif tahun 2014 lalu mayoritas perempuan tidak memiliki keempat komposisi modal yang disebutkan Bourdieu, yaitu modal ekonomi, budaya, sosial dan modal simbolik. Kemiskinan perempuan akan keempat modal tersebut ditambah dengan habitus.

II. Penutup

Kekerasan simbolik merupakan bentuk kekerasan yang paling halus. Kekerasan ini bekerja melalui bahasa. Kekuasaan simbolik adalah kekuasaan yang bekerja melalui simbol-simbol bahasa untuk menggiring mereka yang didominasi mengikuti makna yang diproduksi berdasarkan kepentingan yang mereka yang mendominasi. Dalam menyembunyikan dominasinya, kekuasaan simbolik menggunakan cara-cara yang sangat halus agar tidak dikenali. Karena begitu halusny praktik dominasi yang dijalankan, korban tidak menyadari bahwa yang terjadi adalah praktik kekuasaan. Alih-alih menolak, korban bahkan menerima praktik dominasi tersebut. Pada saat seperti itu, korban mengalami apa yang diistilahkan Bourdieu dengan kekerasan simbolik.

Kekerasan simbolik adalah kekerasan dalam bentuknya yang paling sulit dikenali. Kekerasan yang dikenakan kepada agen-agen sosial tanpa mengundang resistensi, sebaliknya malah mengundang konformitas. Teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu tersebut sangat relevan untuk digunakan dalam melihat bagaimana mekanisme bekerjanya diskriminasi yang dialami perempuan dalam politik

DAFTAR PUSTAKA

Bagus Takwin, "Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup, dalam Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hlm. 35-54.

Bagus Takwin, Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat Melampaui Oposisi Biner dalam Ilmu Sosial, dalam Richard Harker

Fauzi Fashri, Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol (Yogyakarta: Jalasutra dan Republik Institut, 2014

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, terj..Nurhadi, Cet. 7 Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2011

Hadi, Amirul. Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Khofifah Indar Parawansa, Mengukir Paradigma Menembus Tradisi, Pemikiran tentang Kekeragaman Gender, LP3ES, 2006

Ozay, Mehmed, *Women as Rulers Phenomenon in Shout East Asian Islamic Society, The Queens of Aceh*, in World Journal of Islamic History and Civilization1 (3), IDOSI Publication, 2011

Pierre Bourdieu dan L.J.D. Wacquant (ed.), *An Invitation to A Reflexive Sociology* (Chicago: University of Chicago Press, 1992)

Pierre Bourdieu, *Uraian dan Pemikiran*, terj. Ninik Rochani Sjams Kreasi Wacana, Yogyakarta:, 2011

Pierre Bourdieu, *In Other Word: Essays Toward a Reflexive Sociology* (Cambridge: Polity Press, 1990), 130-131.

Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge: Polity Press, 1991), hlm.165.
Richard Jenkins, *Pierre Bourdieu* (London dan New York: Routledge, 1992), hlm. 79.

T. Siegel, James, Rope of God , California University Press, 1965. Lihat juga Hadi, Amirul. Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.